

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Aset Tetap: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Hani Noviani¹, Heni Nurani Hartikayanti²

^{1,2}Universitas Jenderal Achmad Yani

haninoviani_2460107017@ak.unjani.ac.id¹, heni.nurani@ak.unjani.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of human resource competence, internal control system, and information system quality on fixed asset management at Bandung Regency Government. This research uses a quantitative approach with survey method through questionnaires. The research population consists of asset managers in Regional Work Units (SKPD) in Bandung Regency with a sample of 63 respondents selected using purposive sampling technique. Data were analyzed using multiple linear regression analysis with SPSS software. The results show that: (1) Human resource competence does not have a significant effect on fixed asset management; (2) Internal control system has a significant positive effect on fixed asset management; (3) Information system quality has a significant positive effect on fixed asset management; and (4) Simultaneously, human resource competence, internal control system, and information system quality have a significant effect on fixed asset management at Bandung Regency Government. The coefficient of determination test results show that the three independent variables are able to explain variations in fixed asset management, while the rest is influenced by other factors not examined in this study.

Keywords : Human Resource Competence, Internal Control System, Information System Quality, Fixed Asset Management, Local Government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan kualitas sistem informasi terhadap pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner. Populasi penelitian adalah pengelola aset pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bandung dengan sampel sebanyak 63 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset tetap; (2) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan aset tetap; (3) Kualitas sistem informasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan aset tetap; dan (4) Secara simultan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan kualitas sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan variasi pengelolaan aset tetap, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Sistem Informasi, Pengelolaan Aset Tetap, Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumber daya publik yang lebih baik terus menjadi fokus reformasi sektor publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam dekade terakhir, Indonesia mendorong reformasi manajemen sektor publik, salah satunya dengan pengelolaan aset negara dengan dibentuknya regulasi keuangan publik tahun 2003–2004 yang menekankan pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara. (Prayoga, 2017)

Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1977), *good governance* adalah proses di mana lembaga-lembaga publik mengelola urusan publik, mengelola sumber daya, dan menjamin penegakan hukum, dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan adil. Konsep ini menekankan pada penerapan prinsip-prinsip utama, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Dalam upaya mewujudkan *good governance*, pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan segala kepentingan perintahnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 1 menerangkan bahwa Keuangan Daerah merupakan segala hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola anggaran sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang berguna bagi masyarakat.

Sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan informasi tentang nilai kekayaan daerah adalah neraca. Dalam neraca disajikan secara rinci nilai Aset berupa aset lancar (seperti kas dan piutang), aset tetap (seperti tanah, gedung, kendaraan), Nilai utang, serta nilai Ekuitas. Informasi ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui aset yang dimiliki pemerintah dalam mendukung pelayanan publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan BMD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan tujuan memperkuat pengelolaan BMD dengan transparan, terukur, dan efisien.

Tahapan pengelolaan BMD terdiri atas perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Terselenggaranya pengelolaan aset tetap yang baik, kelak memberikan kontribusi yang besar bagi lancarnya aktivitas organisasi maupun instansi pemerintahan agar sampai pada tujuan organisasi. Pengelolaan Aset yang efektif dan efisien tentunya perlu ditunjang oleh pengelola aset yang kompeten, Sistem pengendalian internal, serta Kualitas sistem informasi.

Pemerintah daerah mengelola ribuan jenis aset tetap berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan, yang semuanya harus dicatat, dipelihara, dan dimanfaatkan secara optimal. Namun, pengelolaan aset masih menghadapi tantangan seperti yang diungkapkan oleh Arief Nurcahyo selaku Koordinator Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Direktorat Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bahwa salah satu dari 8 titik rawan korupsi di daerah yaitu pengelolaan BMD. Bagaimana database aset yang kurang akuntabel, administrasi aset tidak tertata dengan baik, pengamanan aset rendah yang dikuasai pihak ketiga menjadi titik rawan korupsi. (DJKN, 2023).

Berdasarkan hal diatas penulis meninjau pada Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 Nomor 700/189/Inspektorat tanggal 17 Maret 2025 .

Tabel 1 Kelemahan Pengelolaan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Temuan
1.	Tanah	1 register belum mencantumkan luas tanah 1909 register belum mencantumkan nomor dan tanggal sertifikat
2.	Peralatan dan Mesin	8 register belum mencantumkan nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, dan nomor BPKB 472 register belum mencantumkan merek/Tipe 11 register dengan kesalahan pencatatan jenis barang
3.	Gedung dan Bangunan	18 register aset belum disertai alamat jelas 3200 register aset belum mencantumkan luas bangunan 2 register yang seharusnya dicatat pada konstruksi dalam pengerjaan
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	477 register belum mencantumkan alamat, panjang, lebar, dan luas yang jelas 1485 register dengan informasi luas 0 m ³ dan 1 m ³ 213 register Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan/Perencanaan yang masih dicatat sebagai aset tetap tersendiri
5.	Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)	5 register sertifikasi tanah dan pekerjaan pemasangan patok dan pengukuran kolam retensi yang belum diatribusikan terhadap aset induknya 17 register tidak memenuhi kriteria sebagai KDP

Sumber: Laporan Hasil Reviu LKPD 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 Kelemahan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2024, diperoleh sejumlah 7.807 register aset tetap belum memiliki informasi yang lengkap. Aset Tetap dengan jumlah aset yang paling banyak belum memiliki informasi yang lengkap yaitu Gedung dan Bangunan sejumlah 3.200 unit. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan penatausahaan aset masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Permasalahan dalam pengelolaan Aset tetap sering kali muncul dikarenakan pengguna BMD belum memenuhi tanggung jawab serta kewajibannya.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mengakibatkan lemahnya pengelolaan aset, salah satunya yaitu sumber daya manusia (SDM) yaitu pengelola pemanfaatan BMD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kompetensi SDM dalam memahami proses pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset mempengaruhi

efektivitas pengelolaan. Laksana et al. (2025) menemukan bahwa pelatihan dan pengetahuan akuntansi memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas penggunaan aplikasi SIPADES di desa. Sejalan dengan penelitian Masdayati et al. (2024), Kompetensi sumber daya manusia secara signifikan mempengaruhi pengelolaan barang milik negara, semakin tinggi kompetensi pegawai maka semakin baik dalam mengelola barang milik negara. Rendahnya pemahaman aparaturnya terhadap siklus hidup aset dapat menyebabkan kesalahan prosedural dan lemahnya akuntabilitas. Sehingga, investasi pengembangan kompetensi SDM secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi sektor publik (Nagari et al., 2025).

Selain faktor SDM, sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh terhadap kinerja organisasi pemerintahan (Rahayu, Intan; Hendaris, 2022). SPI memiliki peran penting dalam menjaga aset tetap dari penyalahgunaan, kehilangan, atau pencatatan ganda. SPI yang baik dapat menciptakan prosedur yang konsisten dan kontrol yang efektif dalam pengelolaan aset (Kusuma Natita et al., 2024). Sistem pengendalian internal dapat membantu kegiatan menjadi efektif dan efisien, serta memastikan keandalan dalam pelaporan keuangan dan perlindungan terhadap aset negara. Penelitian yang dilakukan oleh Apipah et al. (2023) dan Suherlan & Mulyandani (2022) menunjukkan bahwa SPI berpengaruh signifikan terhadap pengamanan aset tetap, meskipun implementasinya masih bervariasi antar daerah. Permasalahan muncul ketika SPI hanya dijalankan berdasarkan formalitas tanpa mempertimbangkan prinsip risiko yang tepat. Penelitian oleh Helmi et al. (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dapat memperkuat pengaruh kualitas SDM serta kualitas sistem informasi manajemen terhadap efektivitas manajemen aset tetap. Hal ini menyebabkan kontrol terhadap pengelolaan aset tidak berjalan optimal dan menciptakan celah penyalahgunaan aset.

Pemanfaatan sistem informasi juga menjadi faktor penting dalam efektivitas pengelolaan aset. Sistem informasi pengelolaan yang digunakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dapat mempercepat proses pencatatan, memperkecil risiko kehilangan data, dan memudahkan integrasi laporan. Studi Rahmadhani & Ariani (2022) menunjukkan bahwa sistem informasi menjadi variabel yang paling dominan dalam mendukung pengelolaan BMD. Ricardo et al., (2022) bahwa pemanfaatan sistem informasi tidak berpengaruh secara signifikan pada pengelolaan BMD. Namun, tantangan dalam penggunaan sistem ini adalah rendahnya kemampuan terhadap aplikasi serta koordinasi antar perangkat daerah. Tanpa adanya pelatihan dan dukungan teknis, sistem informasi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Penggunaan sistem informasi yang tidak disertai dengan pengawasan akan berisiko menimbulkan manipulasi data. Oleh karena itu, sinergi antara kompetensi SDM, SPI, dan sistem informasi menjadi kunci dalam membangun manajemen aset yang efektif. Jefry et al. (2021) menegaskan pentingnya pemahaman regulasi dan kemampuan

teknologi sebagai kombinasi yang memperkuat tata kelola aset. Dengan sistem informasi yang akurat, pengelolaan aset bisa menjadi lebih transparan, efisien, dan terukur.

Saat ini, belum banyak penelitian yang menguji ketiga faktor secara simultan. Selain itu, kebutuhan penelitian diperkuat oleh tuntutan reformasi tata kelola sektor publik yang menekankan pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan aset yang tidak efektif menjadi beban fiskal yang besar. Banyak aset tidak menghasilkan nilai tambah karena tidak dimanfaatkan secara produktif atau tidak tercatat secara sah. Padahal, aset tetap dapat menjadi alat strategis dalam mendukung kebijakan fiskal dan pembangunan daerah jika dikelola secara profesional. Hal ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset.

Dari sisi regulasi, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah menyediakan aturan pengelolaan BMD hingga sistem digital seperti SIMDA BMD. Namun, efektivitas regulasi sangat bergantung pada pengelola pemanfaatan BMD. Imalia et al. (2022) menyatakan bahwa meskipun regulasi memadai, tantangan utama justru ada pada SDM dan sistem informasi yang digunakan. Regulasi tanpa implementasi yang kuat hanya akan menjadi dokumen formalitas

Dari penelitian di atas terlihat masih adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian yang lebih dalam terhadap faktor-faktor penentu efektivitas pengelolaan aset. Dengan melihat kompleksitas persoalan, maka fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama: kompetensi SDM, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan sistem informasi. Sinergi dari ketiga faktor tersebut diharapkan dapat pengelolaan aset yang efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian survei kuantitatif. Penelitian survei digunakan untuk menentukan sampel dari populasi. Pengertian Metode Penelitian menurut Sugiyono, (2023, 2) adalah sebagai berikut :

“Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.”

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2023, 16) adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi SDM, Sistem pengendalian Internal, Kualitas Sistem Informasi dan Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Kompetensi Sumber Daya Manusia diukur melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia pengelola aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam kategori cukup dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengelola Aset belum mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan yang optimal dalam pengelolaan aset. Hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan yang belum sepenuhnya relevan dengan bidang manajemen/akuntansi. Selain itu, pengelola aset belum mampu menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal, serta masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuan penyusunan laporan BMD yang benar sehingga masih memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus untuk menunjang karir dan kompetensinya.
2. Pengelola aset memiliki keterampilan yang masuk dalam kategori cukup, namun belum mampu mencapai tingkat kemahiran yang tinggi. Pengelola aset belum mampu memaksimalkan kemampuan penyelesaian masalah dalam kesalahan pencatatan laporan BMD. Kondisi ini diperkuat dengan fakta bahwa pengelola aset di setiap SKPD belum mampu sepenuhnya mengikuti pelatihan penunjang secara rutin, sehingga dampak pelatihan terhadap kualitas penyajian laporan BMD belum terasa secara signifikan.
3. Pengelola aset memiliki sikap kerja yang dikategorikan cukup, namun belum mampu menunjukkan performa yang konsisten. Pengelola aset belum mampu memastikan seluruh laporan BMD diselesaikan tepat waktu dan sesuai prosedur pada setiap periode secara berkelanjutan. Selain itu, instansi dinilai belum mampu memberikan apresiasi secara optimal kepada pegawai yang taat aturan, sehingga motivasi dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan tempat kerja masih perlu ditingkatkan.

Sistem Pengendalian Internal diukur melalui Lingkungan pengendalian internal, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam kategori cukup dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagian aset memiliki lingkungan pengendalian internal yang dikategorikan cukup, namun belum mampu sepenuhnya menginternalisasi budaya kerja yang baik. Hal ini

terlihat dari bagian aset yang mulai menunjukkan integritas dan komitmen untuk menjadi individu kompeten, namun belum berdampak signifikan terhadap penguatan fondasi organisasi secara menyeluruh.

2. Bagian aset memiliki kemampuan penilaian risiko yang cukup, tetapi belum mampu memitigasi risiko secara proaktif. Meskipun bagian aset telah mulai menganalisis risiko dampak program serta mengidentifikasi risiko fraud dalam laporan BMD, proses identifikasi ini dinilai belum cukup mendalam untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
3. Bagian aset telah melaksanakan kegiatan pengendalian dalam kategori cukup, namun belum mampu memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan secara optimal. Walaupun pengembangan kegiatan pengendalian dan kepatuhan terhadap kebijakan telah diupayakan, dalam implementasinya masih ditemukan ketidakkonsistenan pada prosedur yang telah ditetapkan.
4. Bagian aset memiliki sistem informasi dan komunikasi yang cukup, tetapi belum mampu membangun aplikasi sistem informasi yang terintegrasi. Penyediaan informasi memang diupayakan tepat waktu, namun bagian aset belum mampu mengoptimalkan komunikasi pengendalian internal kepada pihak eksternal (BPK) secara efektif untuk menunjang akuntabilitas publik.
5. Bagian aset memiliki fungsi pemantauan dalam kategori cukup, namun belum mampu menjamin pengawasan yang ketat. Khusus pada aspek identifikasi kegiatan pendukung, bagian aset belum mampu melakukan identifikasi sistem secara mendetail, sehingga evaluasi berkelanjutan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu memastikan seluruh celah pengendalian internal tertutup dengan baik.

Kualitas Sistem Informasi diukur melalui kualitas sistem dan kualitas informasi. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam kategori cukup dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagian aset memiliki kualitas sistem yang dikategorikan cukup, namun sistem tersebut belum mampu memberikan kemudahan optimal bagi pengguna. Hal ini ditandai dengan aplikasi SIMDA-Barang yang belum mampu sepenuhnya memudahkan proses input dan pembaruan data aset secara efisien. Selain itu, sistem belum mampu diakses dengan cepat tanpa hambatan teknis serta belum mampu menjamin fleksibilitas akses kapan saja bagi pengguna, meskipun tampilan sistem dan keamanan data dinilai sudah cukup memadai.
2. Bagian aset memiliki kualitas informasi dalam kategori cukup, namun belum mampu menyajikan informasi yang sempurna untuk mendukung pengambilan keputusan. Data aset yang dihasilkan belum mampu mencapai tingkat akurasi dan kelengkapan yang tinggi sesuai kebutuhan pengelolaan aset. Sistem juga belum mampu menyajikan informasi yang sepenuhnya relevan dengan tupoksi pengguna serta

belum mampu memberikan kemudahan pemahaman yang menyeluruh, walaupun secara konsistensi dan ketepatan waktu pelaporan sudah dianggap mencukupi.

Pengelolaan aset diukur melalui perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan aset, penggunaan aset, pemanfaatan aset, pemeliharaan dan pengamanan aset, penilaian aset, pemindahtanganan aset, penghapusan aset, penatausahaan aset, pemusnahan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa pengelolaan aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam kategori kurang dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran aset memiliki kategori kurang. Hal ini dikarenakan Proses perencanaan kebutuhan aset belum sepenuhnya selaras dengan analisis kebutuhan organisasi serta belum secara maksimal mempertimbangkan kondisi aset yang sudah ada.
2. Pengadaan aset belum mampu sepenuhnya menjamin efisiensi kualitas, kuantitas, dan harga. Selain itu, dokumentasi proses pengadaan belum tersusun dengan baik sehingga aksesibilitas bagi pihak terkait masih terbatas.
3. Penggunaan aset belum mampu memastikan penggunaan aset berjalan efektif. Aset yang diperoleh dinilai belum sepenuhnya digunakan sesuai tujuan pengadaannya dan masih terdapat celah penyalahgunaan untuk kepentingan di luar tugas kedinasan.
4. Pemanfaatan aset belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini didukung dengan aset yang belum sepenuhnya digunakan, dan dimanfaatkan melalui mekanisme sewa, pinjam pakai, atau kerja sama sesuai peraturan.
5. Pemeliharaan dan pengamanan aset belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum mampu melakukan pemeliharaan rutin sesuai standar. Selain itu, pengamanan fisik seperti sertifikasi tanah dan pemagaran belum mampu dilakukan terhadap seluruh aset tetap.
6. Penilaian Aset belum dilaksanakan secara efektivitas. Hal ini dikarenakan bagian aset belum mampu menyajikan nilai aset secara wajar dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
7. Pemindahtanganan aset belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan bagian aset belum mampu memastikan seluruh mekanisme (hibah, tukar menukar, penjualan) terdokumentasi secara lengkap dan transparan.
8. Penghapusan aset belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan bagian aset belum mampu mengelola penghapusan aset rusak secara sistematis sesuai prosedur dan peraturan.
9. Penatausahaan aset belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan bagian aset belum mampu memastikan seluruh aset tercatat lengkap dalam KIB serta belum mampu menyediakan sistem informasi aset yang mendukung data secara *real-time*.

10. Pemusnahaan aset belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan pemusnahan aset daerah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian belum dilakukan secara berkala oleh Inspektorat dan Tindak lanjut atas hasil audit belum mampu dilakukan secara cepat dan tepat.

Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Hasil pengujian secara statistik, kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai signifikan sebesar 0,072 dengan nilai t_{hitung} sebesar 1.830. Hal ini menunjukkan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1.830 < 2,001$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,072 yakni nilai tersebut diatas nilai 0,05 maka variabel independen Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pengelolaan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Secara keseluruhan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dikategorikan cukup. Dengan demikian apabila Kompetensi Sumber Daya Manusia diimplementasikan dengan baik, dalam artian dimensi dari Kompetensi Sumber Daya Manusia (Pengetahuan, keterampilan, dan sikap), dimiliki dengan baik oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bandung khususnya pengelola aset maka akan tercipta pengelola aset tetap yang baik pula.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Hasil pengujian secara parsial sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikan sebesar 0,029 dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,242. Hal ini menunjukkan nilai signifikansi variabel Sistem Pengendalian Internal (X_2) $0,029 < 0,05$ dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,242 > 2,001$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pengelolaan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Secara keseluruhan Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dikategorikan cukup. Dengan demikian apabila Sistem Pengendalian Internal diimplementasikan dengan baik, dalam artian dimensi dari Sistem Pengendalian Internal (Lingkungan pengendalian internal, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan), diimplementasikan dengan baik oleh

Pemerintah daerah Kabupaten Bandung maka akan tercipta tata kelola BMD yang berkualitas.

Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Hasil penelitian secara parsial variabel kualitas sistem informasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 dengan nilai t_{hitung} sebesar 4,787. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka diperoleh nilai signifikansi dibawah 0,005 yaitu $0,001 < 0,05$ dan nilai t_{tabel} yaitu sebesar 2,001 maka nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,787 > 2,001$) sehingga hasil uji t diperoleh H_0 ditolak dan H_1 diterima yaitu Kualitas Sistem Informasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Secara keseluruhan kualitas sistem informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dikategorikan cukup. Dengan demikian apabila kualitas sistem informasi diimplementasikan dengan baik, dalam artian dimensi dari kualitas sistem informasi (kualitas sistem dan kualitas informasi), dimiliki dengan baik oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bandung khususnya pengelola aset maka akan tercipta pengelola aset tetap yang baik pula.

Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem pengendalian Internal, Kualitas Sistem Informasi dan Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Hasil pengujian secara simultan diperoleh dari nilai F_{hitung} sebesar 27.273 dengan nilai signifikan $< 0,001$. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $14,361 > 2,761$ dan tingkat signifikansi $0,001 < 0,005$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Kompetensi SDM, Sistem pengendalian Internal, Kualitas Sistem Informasi dan Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Pengelolaan Aset Tetap memerlukan dukungan dari sumber daya manusia, pengendalian internal, dan sistem informasi.

Berdasarkan pengujian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap dipengaruhi secara simultan oleh sumber daya manusia, pengendalian internal, dan sistem informasi. Jika pengelolaan aset ingin lebih optimal maka harus meningkatkan sumber daya manusia, pengendalian internal, dan sistem informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Sistem Informasi Terhadap

Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, maka diperoleh sebagai berikut :

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat dikategorikan sangat baik dengan indikator diantaranya yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sistem Pengendalian Internal dapat dikategorikan sangat baik dengan indikator diantaranya lingkungan pengendalian internal, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Kualitas Sistem Informasi dapat dikategorikan sangat baik dengan indikator diantaranya kualitas sistem, dan kualitas informasi. Pengelolaan Aset Tetap dapat dikategorikan sangat baik dengan indikator diantaranya perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan aset, penggunaan aset, pemanfaatan aset, pemeliharaan dan pengamanan aset, penilaian aset, pemindahtanganan aset, penghapusan aset, penatausahaan aset, pemusnahan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
3. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
4. Kualitas Sistem Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
5. Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Kompetensi SDM, Sistem pengendalian Internal, Kualitas Sistem Informasi dan Pengelolaan Aset Tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Pengelolaan Aset Tetap.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung diharapkan dapat melaksanakan bimbingan teknis secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan aset tetap.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung diharapkan meningkatkan sistem pengawasan internal melalui optimalisasi manajemen risiko, penguatan budaya organisasi.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung diharapkan terus melakukan pembaruan terhadap sistem informasi agar mendukung akurasi data aset.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung diharapkan meningkatkan pengamanan BMD melalui sertifikasi dan legalitas aset.
5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah responden dengan melibatkan seluruh pengurus barang dan pengurus barang pembantu agar meningkatkan signifikansi hasil penelitian
6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain yang belum dilakukan pengujian pada penelitian ini, seperti gaya kepemimpinan sebagai korelasi dari variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Amelia Manalu, & Ivan Yudianto. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Kabupaten Bandung Barat. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 55–73. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i1.1911>
- Almeida, N., Trindade, M., Komljenovic, D., & Finger, M. (2022). A conceptual construct on value for infrastructure asset management. *Utilities Policy*, 75, 101354. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jup.2022.101354>
- Anisykurlillah, I., & Oktaviana, A. (2020). The Quality of State-Property Reporting: Determinants and Intervening Role of Optimization Management in Indonesia Regional Case. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 12(2), 127–139. <https://doi.org/10.15294/jda.v12i2.25529>
- Argyris, C. (1973). Personality and organization theory revisited. In *Administrative Science Quarterly* (Vol. 18, Issue 2, pp. 141–167). The Johnson Graduate School, Cornell University. <https://doi.org/10.2307/2392060>
- Astini, Y. (2018). Kualitas Aparatur, Sistem Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Efektivitas Manajemen Aset Tetap. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13, 173–184.
- Badan Kepegawaian Negara. (2008). Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008. *Badan Kepegawaian Negara*, 11, 1–33.
- Badan Kepegawaian Negara. (2013). Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil. *Badan Kepegawaian Negara*, 2.
- Carnero, M. C., Martínez-Corral, A., & Cárcel-Carrasco, J. (2023). Fuzzy multicriteria evaluation and trends of asset management performance: A case study of Spanish

- buildings. *Case Studies in Construction Materials*, 19(January 2024), e02660. <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02660>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.2307/259223>
- Dewi Apipah, W., Akuntansi, J., & Negeri Bandung, P. (2023). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengamanan Aset Tetap di Pemerintah Kota Tasikmalaya The Influence of Government Internal Control System (GICS) On Fixed Asset Safeguarding in Tasikmalaya City Government Endah Dw. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(3), 243–251. www.opendata.jabarprov.go.id
- Edwinsyah, E., Munajat, M., Kenamon, M., & Sari, Y. (2025). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 25(1), 455. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v25i1.5849>
- Ekayanti, M., Rifa', A., & Irwan, M. (2018). Determinants Effectiveness Fixed Asset Management of District Government on the Island of Lombok. *International Journal of Business Management and Economic Research(IJBMER)*, 9(1), 1219–1229. www.ijbmer.com
- Erlin Ferida Kusnawati, Khishigjargal Amartur, A., & Hadiwidjojom, D. (2019). Effectiveness of asset management in the public sector with the application of asset management, accountability, monitoring and evaluation, and quality of human resources (Case Study in Government of Blitar City-East Java). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 17(4), 567–575.
- Haliah. (2012). Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya (The Quality of Information in Local Government Financial Statement and the Influential Factors). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19772.95367>
- Hartikayanti, H. N. (2020). The influence of information system implemented on decision making performance hen i nurani hartikayanti. *Researchgate.Net*, July. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20714.34249>
- Helmi, B., Sari, R. N., & Silfi, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Manajemen Aset Tetap: Peran Moderasi Sistem Pengendalian Intern. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 4(1), 1–19. <https://doi.org/10.31258/current.4.1.1-19>
- Imam Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Juliadi, M., Pituringsih, E., & Husnan, L. H. (2017). Determinants Test of the Effectiveness

- of Fixed Asset Management in Mataram City Government. *Papers*, 572–593.
- Kusuma Natita, R., Setiawan, A., Djajadikerta, H., Ekonomi, F., Bisnis, D., Jenderal, U., & Yani, A. (2024). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, 6(1), 97–107.
- Listiani, L., & Agustin, H. (2022). Pengaruh Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan Pengendalian Internal terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(4), 861–882. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.637>
- Nagari, Y. S. R., Romi, M. V., Akhmadi, M. H., & Al-Maraghi, I. N. (2025). The Influence of Civil Servant Competence, Qualifications, and Performance on The Organizational Performance of Regency/City Governments in West Java (An Empirical Study of 27 Local Governments in West Java Province, 2019–2023). *Jurnal Manajemen Motivasi*, 21(2), 1153–1168. <https://doi.org/10.29406/jmm.v21i2.8263>
- Nasution, D. D. A. D. (2023). Navigating Public Sector Asset Management: A Study of the Government of the Republic of Indonesia. *Tec Empresarial*, 18(2), 1264–1281.
- Nursafitri, R. E., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengamanan Aset Tetap Daerah. *Jurnal Maneksi*, 10(2), 177–185. <https://doi.org/10.31959/jm.v10i2.793>
- Pratami, R. A., & Rufaedah, Y. (2020). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pengamanan Aset Tetap. *Prosiding The 11 Th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*, 26–27.
- Prayogi, J. E., Azhar, I., & Zati, M. R. (2021). Pengaruh Pemahaman Regulasi, Sistem Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Manajemen Aset Pada Skpk Kota Langsa. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas)*, 2 Nomor 6(6), 350–361. <https://ejournalunsam.id/index.php/jmas/article/view/4625>
- Rahayu, Intan; Hendaris, R. B. (2022). Pengaruh Penerapan Good Government Governance Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 9(8)*, 2869–2879.
- Rahmadhani, F., & Ariani, R. (2022). Kualitas Aparatur, SIMDA – BMD, Regulasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan BMD. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 291–301. <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.100>
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah* (Issue 040501).
- Sayoga, S. A.-R., & Yudianto, I. (2024). Pengaruh Komitmen Pimpinan dan Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Cimahi oleh Badan Pemeriksa Keuangan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor mewujudkan akuntabilitas pada Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal*

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 4 (2026) 169 – 183 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v8i4.11600

Ekonomi, Akuntansi, Dan Manajemen, 2(1), 105–124.

Skorková, Z. (2016). Competency Models in Public Sector. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 230(September 2016), 226–234. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.029>

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Kedua). Alfabeta.

Suherlan, D., Mulyandani, V. C., & Citra, V. (2022). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengamanan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bekasi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 258–264. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4131>

Syaifudin, M., Ritchi, H., & Avianti, I. (2020). Determinants of Asset Management Effectiveness and Its Impact on The Fairness of The Asset Presentation. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(2), 278–288. <https://doi.org/10.17509/jaset.v12i2.29351>

Urton L. Anderson., Michael J. Head., Sridhar Ramamoorti., Cris Riddle., Mark Salamasick., P. J. S. (2017). *Internal Auditing Assurance & Advisory Service* (4th Edition ed.). In : *The Internal Audit Foundation*.

Wibowo, W. (2014). *Manajemen Kinerja* (Edisi Keenam). Jakarta: Jakarta: Rajawali Pers, 70.